



IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* (GUG)

Oleh

Samsul Rizal¹, Moh Aris Pasigai², M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro³, Ramlah⁴,
Wahyuddin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar
rizalsamsul09@unismuh.ac.id

diterima 11 Oktober 2022, direvisi 18 Februari 2023, diterbitkan 28 Februari 2023

Abstract

The aims of this study are to: 1) describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) in realizing Good University Governance (GUG), and 2) describe the influence of SPMI on GUG. This research was a mixed method with the design used explanatory research design. The population of this research were the lecturers of the Faculty of Economics and Business with 75 persons where the key informants namely lecturer representatives, and heads of study programs/faculty. Collecting data through questionnaires and interviews which were then processed by simple regression analysis and qualitative data obtained by reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research study concluded that; 1) The implementation of SPMI in realizing GUG is carried out in the following the applicable standards included the evaluation which carried out in the form of an internal quality audit to determine the fulfillment of the National Higher Education Standards 2) The coefficient of influence of the application of SPMI on GUG is 0.539 with p value = $0.000 < 0.05$. This shows that SPMI has a significant positive influence on GuG with 56.3%. This can be stated that the better the implementation of SPMI, the realization of GUG in the Faculty of Economics and Business is better.

Keywords: *Internal Quality Assurance System (SPMI), Good University Governance (GUG)*

I. PENDAHULUAN

Peran pendidikan tinggi tidak hanya sebatas pengalihan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun juga berfungsi mengembangkan IPTEKS serta

menjadi *driving force* dalam proses modernisasi dan transformasi dari keadaan sekarang menuju masa depan (Rabiah 2019; Mulyasa dan Aryani 2022). Perguruan

tinggi juga berperan sebagai pembentuk karakter bangsa dan menjadi lokomotif perubahan sosial (Saleh 2017; Fridiyanto 2020). Oleh karena itu perguruan tinggi harus dikelola secara profesional sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan bermutu, maka perwujudan *Good University Governance* (GUG) merupakan suatu keharusan yang diwujudkan dalam pengelolaan perguruan tinggi (Putrika dan Dwija 2021). GUG merupakan konsep yang memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja perguruan tinggi yang jika diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, maka dapat meningkatkan budaya mutu dalam pelayanan akademik dan non akademik sehingga terwujud pencitraan positif, reputasi yang unggul, dan kualitas daya saing yang tinggi (Rosyid, Fakhрина, dan Huda 2014).

GUG dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, dan nirlaba (Anon, 2022; Fuad dan Apriyanti 2018).

Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan *University Governance* (GUG) yaitu dengan implementasi sistem penjaminan mutu (Zunaidi, Andriani, dan Putri 2022). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Siklus SPMI terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* (Hendrawan dan Yulianeu

2017). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu serta dapat mewujudkan budaya mutu (Sulaiman dan Wibowo 2016; Pater, Yudana, dan Natajaya 2020).

Berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang GUG di universitas, diantaranya kajian tentang implementasi GUG pada perguruan tinggi islam (Fuad dan Apriyanti 2018), efektifitas manajemen kepemimpinan dalam menciptakan GUG (Rostiawati 2020), pengaruh penerapan akuntansi manajemen dan teknik manajemen terhadap GUG (Muktiyanto 2016), dan sistem informasi perguruan tinggi dan GUG (Tajuddin, Nimran, dan Astuti 2016). Namun dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya belum ada yang mengaitkan antara implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam mewujudkan GUG di perguruan tinggi, padahal penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan *prototipe* bagaimana peran dan implementasi SPMI dalam mewujudkan GUG di perguruan tinggi khususnya di Unismuh Makassar, hasil penelitian ini juga nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi pengelola perguruan tinggi dan program studi dalam mewujudkan GUG dengan implementasi SPMI secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk : 1) mendeskripsikan penerapan model sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan *good university governance*, dan 2) mendeskripsikan pengaruh sistem penjaminan mutu internal (SPMI) terhadap *good university governance* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran implementasi SPMI sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel SPMI.

Indikator	Nilai Mean	Kategori
X1.1 Penetapan	4,37	Sangat Baik
X1.2 Pelaksanaan	3,89	Baik
X1.3 Evaluasi	3,94	Baik
X1.4 Pengendalian	3,90	Baik
X1.5 Peningkatan	3,85	Baik
Rata-Rata	3,99	Baik

Berdasarkan tabel 1, diperoleh gambaran bahwa implementasi SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berada pada kategori baik. Selanjutnya data tentang *good university governance* diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel GUG.

Indikator	Nilai Mean	Kategori
X2.1. Akuntabilitas	4,09	Baik
X2.2. Responsibilitas	4,19	Baik
X2.3. Transparansi	3,84	Baik
X2.4. Efektifitas	3,86	Baik
X2.5. Independensi	4,04	Baik
Rata-Rata	4	Baik

Berdasarkan tabel 1, diperoleh gambaran bahwa perwujudan *good university governance* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berada pada kategori baik. Selanjutnya data tentang hasil analisis regresi diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Keterangan	Nilai		
R	0.755		
R Square	0.569		
Adj.R Square	0.563		
SEE	6.69		
F	96.48		
Sig	0.000		
Constanta	7.184		
Model	B	Beta	Sig
SPMI X1	0.539	0.755	0.000

Berdasarkan Tabel 3. Diperoleh bahwa:

- Angka R sebesar 0.755 menunjukkan bahwa korelasi nilai pengamatan dan nilai prediksi cukup kuat.
- Angka R square atau koefisien determinasi sebesar 0.569. Hal ini berarti bahwa model mempunyai daya ramal 56,9% variasi Y dijelaskan oleh model.
- Adjusted R Square sebesar 0.563. Hal ini berarti 56,3% variasi dari variabel terikat bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
- Standard Error of Estimate (SEE) sebesar 6.69. Makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat memprediksi variabel terikat.
- Hasil persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut: $Y = 7.18 + 0,539X1$.
- Koefisien pengaruh penerapan SPMI terhadap GUG sebesar 0,539 dengan nilai $p = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa SPMI berpengaruh signifikan positif terhadap *good university governance*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik implementasi SPMI, maka pengaruh sistem penjaminan mutu internal (SPMI) maka perwujudan *good university governance* di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis akan semakin meningkat/baik.

Selanjutnya, rangkuman data hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah di FEB telah tersedia Gugus Kendali Mutu (GKM)?
FEB telah memiliki Gugus Kendali Mutu yang disingkat dengan GKM. Pada periode sebelumnya organisasi penjaminan mutu di FEB disebut dengan Unit Penjaminan Mutu yang disingkat dengan UPM. Pada tingkat program studi terdapat divisi-divisi yang merupakan bagian dari struktur GKM.
2. Apakah di FEB telah memiliki Dokumen SPMI? FEB telah memiliki dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan Akademik (Buku Satu) dan Kegiatan Non Akademik (Buku Dua), disamping dokumen-dokumen mutu yang lain.
3. Apakah Dokumen SPMI telah disosialisasikan kepada prodi, dosen, mahasiswa, dan stakeholders lainnya? Karena keberadaan Dokumen SPMI pada tingkat fakultas baru ada pada tahun 2020 maka sosialisasi yang dilakukan oleh UPM/GKM masih lebih fokus pada program studi dan dosen FEB walaupun itu masih dilakukan secara parsial dalam arti bahwa sosialisasi itu dilakukan secara terbatas sesuai dengan topik tertentu.
4. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pencapaian standar mutu? Yang bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pencapaian standar mutu sebagaimana tertuang dalam dokumen standar mutu secara operasional tentu adalah Dekan Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis, tetapi secara kelembagaan yang bertanggungjawab adalah mulai dari tingkat Universitas yaitu Badan Pembina Harian (BPH), Rektor dan Wakil Rektor, Lembaga. Sedangkan pada tingkat Fakultas tanggungjawab itu berada pada Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Unit Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu (GKM)

5. Apakah telah dilaksanakan evaluasi ketercapaian standar, berapa kali dilakukan, apakah setiap semester atau setiap tahun? Evaluasi ketercapaian standar dilakukan melalui Audit Internal yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)/Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui auditor yang ditugaskan oleh BPM).
6. Kapan dimulai penerapan SPMI? Penerapan SPMI sebenarnya mulai diberlakukan sejak tahun 2018, namun secara efektif pemberlakuan itu mulai tahun 2020 hal ini bisa terlihat pada isian-isian borang akreditasi program studi secara keseluruhan sudah mengacu pada dokumen standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pemberlakuan SPMI terhitung mulai tahun 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Dekan FEB untuk setiap dokumen SPMI tersebut.
7. Berapa Standar Mutu yang ditetapkan dalam SPMI? Standar Mutu dalam SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prinsipnya merupakan penjabaran dari standar mutu yang ditetapkan oleh universitas, yaitu 30 standar, yang terdiri dari 24 Standar Nasional Dikti dan 6 standar yang dikembangkan berdasarkan

kebutuhan internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah).

8. Apakah telah dilakukan monev? Kapan dimulai, dan sudah berapa kali dilaksanakan? Monev dilakukan secara rutin dan terjadwal yang dilaksanakan setiap akhir semester pada tahun akademik, dilakukan pada tingkatan program studi, dan dilakukan oleh lembaga Gugus Kendali Mutu bersama-sama dengan divisi monev untuk di setiap program studi. Hasil monev di sampaikan kepada pimpinan fakultas untuk ditindak lanjuti dalam rapat tindaklanjut manajemen (RTM).
9. Apakah telah dilakukan Audit Mutu Internal? Kapan dimulai, dan sudah berapa kali dilaksanakan? Audit mutu internal dilakukan sekali dalam setahun, kecuali ada sesuatu yang dianggap penting sehingga perlu dilakukan audit mutu internal. audit mutu internal dilakukan oleh auditor-auditor internal melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM). Orientasi audit mutu internal adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana ketercapaian standar mutu berdasarkan indikator pencapaian yang telah ditetapkan.
10. Upaya apa yang dilakukan pimpinan dalam pengendalian Standar Mutu? Upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengendalikan standar mutu adalah dengan berpedoman pada manual mutu yang ditetapkan pada setiap standar mutu. Langkah pengendalian dilakukan didasarkan pada tahapan pengendalian yaitu dari mana harus dimulai dan berakhir dimana pengendalian tersebut.
11. Apa upaya yang dilakukan pimpinan dalam peningkatan Standar Mutu? Untuk melakukan peningkatan Standar Mutu, maka

pimpinan harus berdasarkan pada hasil pengendalian standar mutu untuk setiap bidang standar mutu. Dari hasil pengendalian standar tersebut, pimpinan melakukan perbaikan dan peningkatan tindak lanjut standar.

12. Apakah ada standar mutu yang ditetapkan telah melampaui standar dikti?
Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan pertimbangan keperluan internalnya, maka telah menetapkan Standar mutu melampaui standar mutu pendidikan tinggi, yaitu sebanyak 6 standar.
13. Apa upaya yang dilakukan oleh pimpinan fakultas untuk pemenuhan atau pencapaian standar mutu?
Upaya yang dilakukan oleh pimpinan fakultas dalam memenuhi atau mencapai standar mutu adalah dengan mendasarkan pada rasionalitas standar pada setiap bidang, kemudian berdasarkan rasionalitas tersebut ditetapkan pernyataan isi standar. Setiap pernyataan isi standar tersebut selanjutnya pimpinan menetapkan Strategi Pencapaian Standar yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan *Good University Governance* (GUG) diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah di FEB telah terwujud prinsip Akuntabilitas? Apa Contohnya, jelaskan dan apa kendala atau permasalahannya?

Prinsip akuntabilitas di FEB pada beberapa aspek dan kegiatan baik dalam kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik misalnya

distribusi pembimbingan skripsi, distribusi penguji proposal, seminar hasil dan ujian skripsi sudah terdistribusi dengan baik walaupun masih terdapat masalah dalam penjadwalan dan pelaksanaan ujian. Sedangkan bidang non akademik yaitu administrasi dan keuangan juga semakin menunjukkan akuntabilitas yang semakin baik.

2. Apakah di FEB telah terwujud prinsip responsibilitas? Apa contohnya, jelaskan dan apa kendala dan permasalahannya?

Responsibilitas di FEB juga telah terwujud dalam lingkup civitas akademika. Hal ini ditunjukkan dengan ketanggapan dari pimpinan fakultas, pimpinan program studi terhadap setiap permasalahan terjadi baik dikalangan dosen, mahasiswa. Walaupun disadari bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas.

3. Apakah di FEB telah terwujud prinsip transparansi? Apa Contohnya, jelaskan dan apa kendala dan permasalahannya?

Prinsip transparansi berhubungan erat dengan prinsip akuntabilitas, oleh karena prinsip akuntabilitas telah terwujud di FEB maka tentu secara otomatis juga prinsip transparansi juga sudah terwujud. Hal ini bisa tercermin dalam pengambilan keputusan di tingkat pimpinan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat pimpinan yang dilakukan secara rutin.

4. Apakah di FEB telah terwujud prinsip independensi? Apa Contohnya, jelaskan dan apa kendala atau permasalahannya?

Prinsip independensi tentu harus di kaitkan tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja. Oleh karena itu maka berdasarkan

pemahaman tugas pokok dan fungsi tersebut, maka independensi tentu telah terwujud di FEB. Namun demikian bukan berarti independensi itu bersifat mutlak apabila kita berbicara dalam konteks kelembangan secara menyeluruh, karena ada hierarki, ada wewenang dan tanggungjawab sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan demi kepentingan organisasi.

5. Apakah di FEB telah terwujud prinsip efektifitas? Apa Contohnya, jelaskan dan apa kendala atau permasalahannya?

Prinsip efektifitas di FEB sudah terwujud. Wujud efektifitas diperoleh dengan semakin banyaknya kegiatan akademik yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih sering terdapat permasalahan yang dihadapi karena keterbatasan yang dimiliki oleh fakultas, walaupun secara bertahap dilakukan perbaikan-perbaikan.

Penerapan model sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan *good university governance*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan *good university governance*. Dalam hal implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan *good university governance* (GUG) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama Pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.

Untuk menjamin keterlaksanaan sistem penjaminan mutu maka diperkuat dengan dokumen legal unsur pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Badan Penjaminan Mutu (BPM) Lembaga penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah

Makassar pada awalnya dibentuk dengan nama Kantor Jaminan Mutu (KJM) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 087/II.3.AU/F/2009 kemudian berubah nama menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan SK Nomor 369 Tahun 1443 H / 2021 M.

- 2) Gugus Kendali Mutu (GKM). Pelaksana penjaminan mutu tingkat fakultas dilembagakan dalam bentuk Gugus Kendali Mutu berdasarkan SK Rektor No: 611 Tahun 1443 H / 2021 M Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin seorang kepala GKM berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 546 Tahun 1443 H/ 2021 M dan dibantu seorang Sekretaris dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 547 Tahun 1443 H/ 2021 M. Berdasarkan SK Rektor nomor 611 Tahun 1443 H/2021 M.

- 3) Tim Audit Mutu Internal (AMI) tingkat program studi

b. Tahap kedua: Penyediaan dokumen mutu

Penyediaan dokumen mutu berupa: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, dan berbagai dokumen kebijakan yang menunjang pelaksanaan penjaminan mutu.

- c. Tahap Ketiga: Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Untuk mengetahui pemenuhan standar Pendidikan tinggi (Standar Dikti) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan oleh Rektor maka SPMI dilaksanakan oleh unit kerja sebagai berikut:

- 1) Dekan

Dekan bertanggung jawab dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi termasuk standar jati diri, standar kerjasama dan tata pamong.

- 2) Wakil Dekan I.

Wakil dekan I dalam pelaksanaan SPMI terkait dengan standar Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kerjasama yang

terdiri standar isi pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar Kerjasama, standar pelaksanaan penelitian, standar hasil penelitian, standar pelaksanaan pengabdian dan standar hasil pengabdian) yang kemudian dikoordinasikan ke masing-masing pimpinan program studi.

- 3) Wakil Dekan II

Wakil dekan II dalam pelaksanaan SPMI terkait dengan standar keuangan, SDM, dan prasarana yang terdiri dari standar pengelolaan keuangan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar pembiayaan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar sarana dan prasarana pengabdian, standar pembiayaan pengabdian.

- 4) Wakil Dekan III

Wakil dekan III bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI terkait dengan standar kemahasiswaan.

- 5) Wakil Dekan IV.

Wakil dekan IV bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI terkait dengan standar Al Islam Kemuhammadiyah.

- 6) Program studi.

Pimpinan program studi dalam pelaksanaan SPMI terdiri dari Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran.

- d. Tahap Keempat: Evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan berdasarkan panduan audit mutu internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi ini dilakukan dalam bentuk audit mutu internal untuk mengetahui pemenuhan standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang telah dilaksanakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

- e. Tahap Kelima Pengendalian.

Berdasarkan hasil audit mutu internal maka pimpinan Fakultas Ekpnpmi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan beberapa tindakan pengendalian yaitu: Mempertahankan capaian standar. Pengendalian standar dilakukan dengan mempertahankan capaian standar yang telah ada sehingga dalam proses pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu; dan Mempertahankan pelampauan standar. Pengendalian standar dilakukan dengan mempertahankan pelampauan standar yang telah ada.

f. Tahap Keenam Peningkatan.

Terdapat beberapa standar yang telah ditetapkan yang dalam pelaksanaannya ternyata masih memungkinkan untuk ditingkatkan pelampauannya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Penerapan model sistem penjaminan mutu internal (SPMI) telah ditemukan mampu mewujudkan *good university governance* hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara yang dapat dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat meningkatkan prinsip akuntabilitas. Dalam bidang akademik misalnya telah ditetapkan standar pembimbingan dengan rasio bahwa setiap dosen maksimal memiliki bimbingan maksimal 6 mahasiswa persemester, sehingga distribusi pembimbingan skripsi, penguji proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi sudah terdistribusi dengan baik. Demikian halnya dalam standar proses pembelajaran telah ditetapkan beban mengajar dosen maksimal 12 SKS persemester, sehingga pembagian mata kuliah terdistribusi dengan baik, dan sudah tidak ada lagi dosen yang memiliki beban kerja yang sangat banyak.

Dalam hal tanggung jawab juga dapat dijelaskan bahwa dengan implementasi SPMI dapat meningkatkan tanggung jawab pimpinan, dosen, dan pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya standar SPMI yang mengatur tentang tingkat kepuasan mahasiswa dan stakeholders terhadap kualitas layanan, dimana survei tersebut dilakukan setiap semester dan digunakan

sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut sehingga ketanggapan dari pimpinan fakultas, pimpinan program studi terhadap setiap permasalahan terjadi baik dikalangan dosen, mahasiswa semakin meningkat.

Demikian juga dalam hal transparansi dan efektifitas, dengan adanya SPMI yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga transparansi dan efektifitas semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya audit mutu, baik audit mutu akademik maupun audit mutu non akademik (keuangan). Prinsip transparansi semakin baik karena ditunjang dengan penggunaan sistem informasi terintegrasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, maka temuan penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi SPMI telah dilakukan dengan penerapan siklus PPEPP dengan lima tahapan yaitu: pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, penyediaan dokumen mutu, pelaksanaan penjaminan mutu oleh dekan, wakil dekan, dan ketua prodi, evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan berdasarkan panduan audit mutu internal (AMI), pengendalian standar dilakukan dengan mempertahankan capaian dan pelampauan standar yang telah ada sehingga dalam proses pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu dan mempertahankan pelampauan standar, dan peningkatan melalui peningkatan pelampauan standar baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya mutu, maka implementasi SPMI harus terus diterapkan secara berkesinambungan sehingga terwujud budaya mutu. Dan untuk mewujudkan budaya mutu, maka semua sivitas akademika harus berpikir, bersikap, bertindak sesuai standar mutu, serta senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus. Selain itu, hal penting yang harus diwujudkan adalah dengan pemenuhan dan peningkatan kepuasan stakeholder *internal* yaitu dosen,

pegawai, dan mahasiswa, serta *stakeholder* internal yaitu alumni, pengguna lulusan, mitra kerjasama, dan masyarakat secara umum.

Untuk mendukung terwujudnya budaya mutu, maka penerapan SPMI perlu didukung dengan berbagai kegiatan lainnya seperti program akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional, serta pengembangan implementasi SPMI mengacu pada manajemen mutu ISO.

Pengaruh sistem penjaminan mutu internal (SPMI) terhadap *good university governance* (GUG)

Berdasarkan analisis regresi pada tabel 4.10, diperoleh koefisien pengaruh penerapan SPMI terhadap GUG sebesar 0,539 dengan nilai $p = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa SPMI berpengaruh signifikan positif terhadap *good university governance*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik implementasi SPMI, maka pengaruh sistem penjaminan mutu internal (SPMI) maka perwujudan *good university governance* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan Semakin Meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan GUG yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap GUG (Maulidina 2017; Sari 2012; Puspitarini 2012), SPMI sebagai penjaminan mutu pada lembaga pendidikan peningkatan, inovasi, komunikasi, motivasi dan pengawasan atau *control* (Fadhli 2020) dan SPMI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu universitas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya mahasiswa (Sila 2017).

Lebih lanjut, penelitian ini relevan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal dan sistem manajemen mutu ISO memiliki pengaruh bagi peningkatan kinerja organisasi di Universitas (Wismaya 2016). Sistem penjaminan mutu internal berpengaruh

signifikan terhadap kinerja organisasi (Willy 2018).

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga tarik simpulan bahwa: 1) Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan *good university governance* (GUG) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; b) Penyediaan dokumen mutu berupa: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, dan berbagai dokumen kebijakan yang menunjang pelaksanaan penjaminan mutu; c) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh dekan, wakil dekan, dan ketua prodi; d) Evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan berdasarkan panduan audit mutu internal; e) Pengendalian standar dilakukan dengan mempertahankan capaian dan pelampauan standar yang telah ada sehingga dalam proses pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu dan mempertahankan pelampauan standar; f) Peningkatan melalui peningkatan pelampauan standar baik secara vertikal maupun secara horizontal. 2) Koefisien pengaruh penerapan SPMI terhadap GUG sebesar 0,539 dengan nilai $p = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa SPMI berpengaruh signifikan positif terhadap *good university governance* dengan pengaruh sebesar 56,3%. Hal tersebut diartikan bahwa semakin baik implementasi SPMI, maka perwujudan *good university governance* semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel & Pawe. (2021). Pengaruh Bimbingan Belajar Orang Tua Terhadap Disiplin Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(2), 301–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.37478/jpm.v2i2.1209>
- Baiti, N. (2020). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Anak di Masa COVID-19. *Primearly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar Dan*

- Anak Usia Dini*, III(2), 113–127.
- Diadha, R. (2015). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak. *Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 61–71.
- Edy et al. (2018). Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dan Pola Asuh Terhadap Disiplin Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(2), 221–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUUD.122>
- Gasong, D. (2018). *Belajar dan Pembelajaran*. Deepublish.
- Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, H. P. (2018). Hubungan antara kedisiplinan belajar siswa dengan prestasi belajar di SMA Negeri 1 Kota Metro. *Dewantara*, V.
- Isnaini & Rifai. (2018). *Strategi Self-Management untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar* (Kunthi Pratiwi (ed.)). CV Sindunata.
- Junianto & Wagiran. (2013). Pengaruh Kinerja Mengajar Guru, Keterlibatan Orang Tua, Aktualisasi Diri dan Motivasi Berprestasi terhadap Prestasi. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(3), 310.
- Kemdikbud RI. (2017). *Menjadi Orang Tua Hebat*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ni'mah & Setyawan. (2021). Online Learning: Analisis Faktor Penurunan Disiplin Peserta Didik Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Paedagogia*, 10(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/pdg.Vol10.Iss1.134>
- Nurmalia et al. (2021). Analisis Keterlibatan Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar. *PRIMARY: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR*, 10(6), 1654–1663. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33578/jpfkip.v10i6.8555> <https://primary.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPFKIP>
- Prasetyo, et al. (2021). Implementasi Metode Home Visit untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Abdidas*, 2(4), 894–902. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i4.388>
- Rusni & Agustan. (2018). Pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 01(1), 1–9.
- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *In Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 51–56.
- Salleh & Rosli. (2019). Parental Involvement in Discipline Management of Special Education Students in Schools. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development.*, 8(4), 912–920. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v8-i4/6781>
- Sundari & Rachman. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kedisiplinan Siswa Kelas Tinggi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*, 2(1).
- Tekin, A. K. (2011). Parent Involvement Revisited: Background, Theories, and Models. *IJAES – Vol. 11 No. 1 Pg. No. 2*, 11(1), 1–13.
- Yuliyantika, S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa kelas X,XI, DAN XII di SMA Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1)